

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KOTO PAYANG
KECAMATAN DEPATI TUJUH KABUPATEN KERINCI**

**RISTIA ROSNALIA, AFRIANTI, FLORA LIDIA SANDI
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email:

ristiarosnalia@yahoo.com

afrianti@gmail.com

floralidiasandi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to conduct a study on the Effect of Understanding and Role of Village Apparatus on Accountability of Village Fund Management in Koto Payang Village, Depati Tujuh District, Kerinci Regency. The research method used is descriptive quantitative method. The sample in this study the authors took all of the population to be used as samples considering the total population was 16. The sample in this study came from the Village Apparatus as many as 10 people including the village head 1 person and BPD members 5 people so the research population was 16 people. The research instrument was the researcher himself and collected data through questionnaires and field observations and conducted instrument tests, normality tests, linearity tests and hypothesis tests. The results of this study have an influence between the understanding and role of village officials on the accountability of village fund management in Koto Payang Village, Depati Tujuh District, Kerinci Regency, both partially and simultaneously. Village Fund Management Accountability will increase if there is a positive influence between understanding and the role of the apparatus village. The influence of the Understanding and Role of Village Apparatus on Village Fund Management Accountability in Koto Payang Village, Depati Tujuh District, Kerinci Regency is 72.6% if together and individually the influence of Village Apparatus Understanding on Village Fund Management Accountability is 41.2%, and the influence of the Role of Village Apparatus on Village Fund Management Accountability is 30.8% and the rest is influenced by other variables outside the research variables. Simple linear regression analysis and hypothesis testing (t test). Together (simultaneously) the Effect of Understanding and Role of Village Apparatus on Accountability of Village Fund Management in Koto Payang Village, Depati Tujuh District, Kerinci Regency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam

penelitian ini penulis mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan sampel mengingat jumlah populasi adalah sebanyak 16. Sampel dalam penelitian ini berasal dari Perangkat Desa sebanyak 10 orang termasuk kepala desa 1 orang dan Anggota BPD 5 orang jadi populasi penelitian sebanyak 16 orang. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan pengumpulan data melalui kuisioner dan observasi lapangan dan melakukan uji instrumen, uji Normalitas, Uji Linieritas dan Uji Hipotesis. Hasil Penelitian dalam penelitian ini Terdapat Pengaruh antara Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci baik secara persial maupun simultan. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa akan mengalami kenaikan jika ada pengaruh yang positif antara pemahaman dan peran perangkat desa. Besar pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci sebesar 72,6 % jika bersama-sama dan sendiri-sendiri pengaruh Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah 41,2 %, dan pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 30.8 % dan selebihnya dipengaruhi variabel lain di luar variabel penelitian. Analisis regresi linear sederhana dan Uji Hipotesis (Uji t). Secara bersama-sama (simultan) Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Prinsip akuntabilitas ditingkat Pemerintah Desa sangat dianjurkan untuk diterapkan, hal ini dikarenakan Pemerintah Desa merupakan wewenang yang bertanggungjawab terhadap dana yang diterima untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Untuk itu para pengelola keuangan desa dituntut untuk lebih terbuka terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan semakin tinggi tanggungjawab pengelola dana desa maka akan semakin baik akuntabilitas yang diterapkan dalam Pemerintah Desa dan semakin rendah tanggungjawab pengelola dana desa maka akan semakin buruk akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada dalam Pemerintahan Desa tersebut.

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu Kabupaten yang menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha membantu dan meningkatkan Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa dengan tujuan demi meningkatkan Pemerintahan Desa yang *good governance*. Namun, dalam penyajiannya masih mengalami berbagai kendala dan masalah. Salah satu kasus penyelewengan atau pelanggaran mengenai laporan keuangan dana desa, terjadi di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2020 puluhan warga di

desa tersebut menggeruduk Kepala Desa (Kades) setempat, karena diduga ada beberapa hal yang mencurigakan dalam mekanisme pengelolaan dana desa di tahun 2020. Untuk itu mereka menuntut agar Kades bisa lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Selain kasus tersebut, terjadi penyimpangan penggunaan dana desa di Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Kasus ini telah dilakukan oleh oknum kepala desa dan semuanya telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Namun supaya bentuk pertanggungjawaban tidak terlalu rumit, Pemerintah Kabupaten Kerinci meminta, supaya laporan yang baik disarankan kepada kepala desa agar menggunakan Sistem Keuangan Desa atau yang disingkat Sikudes, guna untuk meminimalkan penyimpangan saat penggunaan dana desa dan juga untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang *good governance* atau salah satunya yaitu tercapainya akuntabilitas.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci”

II. TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat terkecil dalam suatu daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dilingkungannya tersebut dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menganut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selama menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang bertugas membantu dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa. Perangkat desa ini terdiri atas:

1. Sekretariat desa
2. Pelaksana kewilayahan
3. Pelaksana teknis

Dana Desa

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selama masa berjalan, PP Nomor 60 Tahun 2014 ini mengalami perubahan dan direvisi dalam PP Nomor 22 Tahun 2015. Perubahan tersebut terletak pada pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Tujuan dari dana desa sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Pemahaman

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Menurut Sudirman (2001:53) adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

Pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu :

- a. Menerjemahkan (translation)
- b. Menafsirkan (interpretation)
- c. Mengeksplorasi (extrapolation)

Perangkat desa diharapkan dapat memahami peraturan dalam UU N0. 6 tentang desa agar meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi, seperti kesalahan dalam menjalankan tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang perangkat desa karena terjadi kesalahan dalam menafsirkan UU N0.6 tentang desa tersebut. Kesalahan dalam menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari perangkat desa dalam mengelola dana desa.

Sesuai dengan isi dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemahaman perangkat desa aparat pengelola dana desa ini diukur berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Pengetahuan
2. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan

3. Keahlian teknis
4. Kemampuan mencari solusi
5. Inisiatif dalam bekerja
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peran

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Peran memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*)
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*)
3. Konflik peranan (*Role Conflick*)
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*)
5. Kegagalan peran (*Role Failure*)
6. Model peranan (*Role Model*)
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*)

Indikator yang digunakan untu mengukur Perangkat Desa adalah:

1. Keterlibatan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa
2. Keterlibatan dalam melakukan verifikasi keuangan
3. Keikutsertaan dalam pengelolaan dana desa
4. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran
5. Keterlibatan dalam proses penatausahaan penggunaan dana desa
6. Ikut serta melakukan audit partisipatif

Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa ini merupakan sebuah siklus yang memiliki keterkaitan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

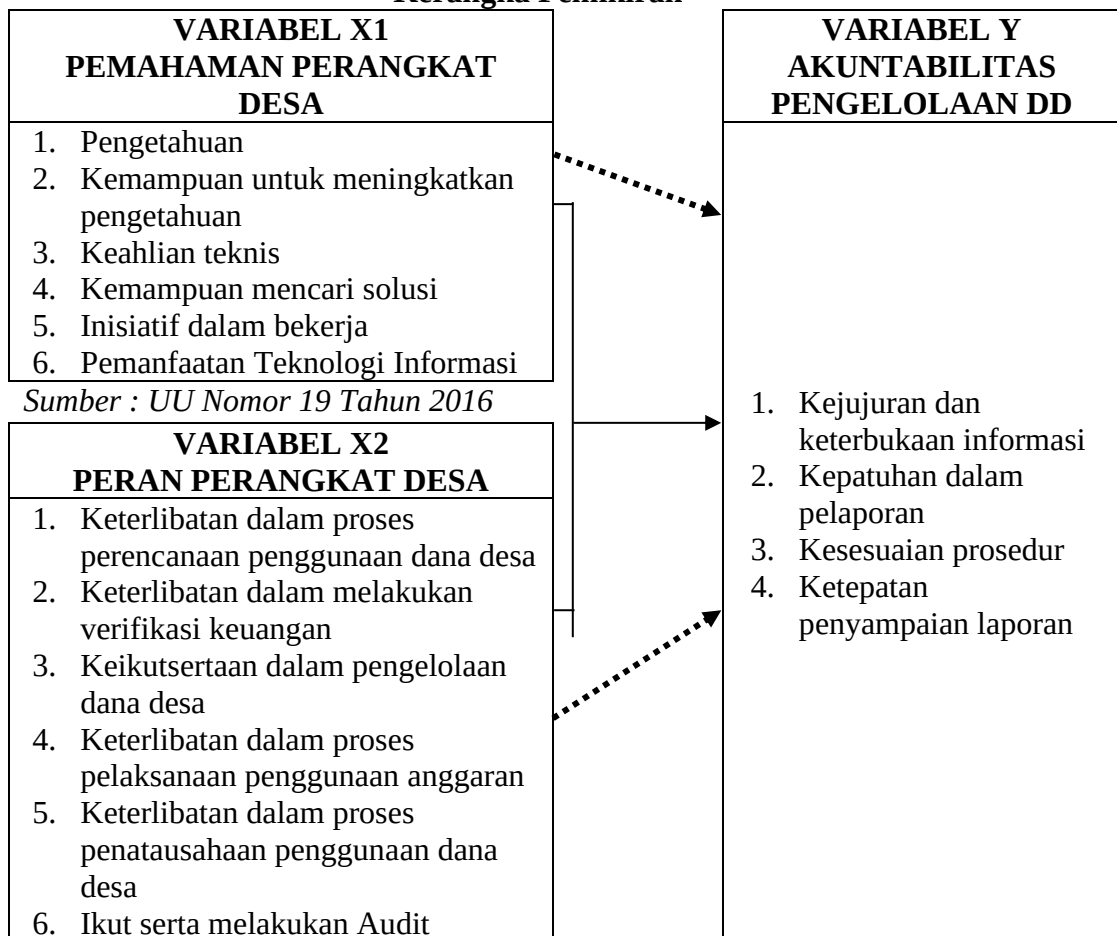
Indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi
2. Kepatuhan dalam pelaporan
3. Kesesuaian prosedur
4. Ketepatan penyampaian laporan

Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dan dapat di gambarkan Kerangka Pemikiran dalam bagan skematis gambar 1.1. berikut ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : UU No 6 Tahun 2014

Sumber : Permendagri No113 Tahun 2014

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono (2003:214) bahwa penelitian Kuantitatif merupakan alat untuk meneliti dengan melakukan perhitungan-perhitungan. Dalam penelitian ini di perlukan guna memberi gambaran hasil penelitian. Selanjutnya guna memperkuat adanya suatu korelasi variabel itu, maka memerlukan pembuktian analisa dilakukan terhadap jawaban hasil angket yang di sebar kepada responden.

Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil tempat Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Karena di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci penulis melihat bahwa akuntabilitas pengelolaan dana Desanya tidak jelas sehingga menimbulkan kecurigaan mungkin ada pengaruhnya terhadap pemahaman dan peran perangkat desa Koto Payang, maka sebab itu saya tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

Variabel dan Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel bebas (X1), (X2) dan variabel terikat (Y), yaitu:

1. Pemahaman Perangkat Desa (X1)
2. Peran Desa (X2)
3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa sebanyak 10 orang termasuk kepala desa 1 orang dan Anggota BPD 5 orang jadi populasi penelitian sebanyak 16 orang.

Sampel dalam penelitian ini penulis mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan sampel mengingat jumlah populasi adalah sebanyak 16 orang hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2004 : 107) mengatakan bahwa apabila banyaknya sampel kurang dari 100 lebih baik di ambil semua, disebut juga sampel jenuh atau total sampling.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu Pemahaman dan Peran Perangkat Desa sebagai variabel bebas (*independent*) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel terikat (*dependent*).

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Pustaka (*Libary Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam mengumpulkan data-data, penulis membutuhkan alat yang di gunakan seperti Angket/qusioner

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Statistik. Dengan menggunakan Program Aplikasi SPSS 1.6 Adapun Analisis-Analisis Yang digunakan adalah sebagai Berikut :

1. Uji Instrument
2. Uji Validitas
3. Uji Reliabilitas
4. Uji Normalitas
5. Uji Linearitas
6. Uji Multikolinieritas
7. Uji Heteroskedastisitas
8. Analisis Regresi Linier Berganda
9. Koefisien Determinan
10. Uji Hipotesis Statistik

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Adapun caranya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan dengan skor total individu. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS for Windows Versi 16.0. Dalam penelitian ini pengujian validitas hanya dilakukan terhadap 15 orang, Perangkat Desa sebanyak 10 orang termasuk kepala desa 1 orang dan Anggota BPD 5 orang jadi berjumlah 15 orang dengan ketentuan untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, = $16-2=14$ maka $r_{tabel} = 0,497$

Berdasarkan tabel 4.8 diatas maka dapat dikatakan bahwa semua item dinyatakan valid atau handal. Sedangkan untuk melihat hasil pengujian validasi untuk variabel Kualitas Pelayanan, bisa dilihat pada tabel 3.9. di bawah ini :

Berdasarkan tabel 4.9. diatas maka dapat dikatakan bahwa semua item dinyatakan valid atau handal. Sedangkan untuk melihat hasil pengujian validasi untuk variabel Akuntabilitas, bisa dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini :

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

Berdasarkan tabel 4.12 di atas pada kolom kolmogrov-smirnov didapat dari pemahaman sebesar 0,180 dan signifikan pada 0,200, untuk peran sebesar 0,139 dan signifikan pada 0,200 sedangkan untuk akuntabilitas sebesar 0.196 dan signifikan pada 0,126. metode pengambilan keputusan untuk uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut terdistribusi normal dan jika signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Kemudian dilihat dari hasil yang diperoleh dalam kolom kolmogrov-smirnov dapat diketahui bahwa hasil tes pemahaman, peran dan akuntabilitas

melebihi nilai signifikansi ($0,180 > 0,05$), ($0,139 > 0,05$) dan ($0,126 > 0,05$). Karena nilai signifikansi yang didapat dalam kolom kolmogrov-smirnov baik nilai pemahaman, peran dan akuntabilitas melebihi taraf signifikasi yaitu 0,05, maka dapat diasumsikan bahwa data hasil tes pemahaman, peran dan akuntabilitas berdistribusi normal.

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dalam hasil SPSS pada kolom Linearity merupakan uji statistik untuk menunjukan hubungan yang linear. Metode pengambilan keputusan untuk uji linearitas yaitu dengan signifikansi $< 0,05$, maka hubungan antara dua variabel linier dan sebaliknya jika signifikansi $> 0,05$, maka pengaruh antara variabel tidak linier Priyatno (2010, : 46).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji linearitas pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa pemahaman terhadap akuntabilitas mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 dan peran terhadap akuntabilitas mempunyai nilai signifikan sebesar 0,002. Dilihat dari nilai signifikan di atas data pemahaman terhadap akuntabilitas sebesar ($0,000 < 0,05$) dan peran terhadap akuntabilitas sebesar ($0,002 < 0,05$), maka dapat diasumsikan bahwa Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa mempunyai pengaruh yang linier.

Dari hasil uji Multikolineritas pada tabel 4.14 di atas dapat diketahui:

1. Nilai tolerance variabel frekuensi pemahaman (X1) yakni 0,773 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel frekuensi perdagangan saham (X1) yakni 1.294 lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas.
2. Nilai tolerance variabel volume peran (X2) yakni 0,773 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel volume perdagangan saham (X2) yakni 1.294 lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas.

Terlihat dari Tabel 4.15 diatas menunjukkan pengujian ini dengan menggunakan Uji Glejser pada variabel pemahaman dan peran memiliki nilai signifikan lebih besar dari pada 0,05. Sesuai ketentuannya dapat diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga hasil analisis data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pada tabel 4.14. diatas dapat digambarkan persamaan regresi linear sebagai berikut :

Konstanta sebesar 37.206 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel pemahaman dan peran maka akuntabilitas adalah sebesar 37.206 satuan

Koefisien regresi pemahaman perangkat desa adalah positif yaitu sebesar 0,032 artinya jika pemahaman ditingkatkan, maka kecenderungan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci akan meningkat.

Koefisien regresi peran perangkat desa adalah positif yaitu sebesar 0,053 artinya jika peran perangkat desa ditingkatkan maka Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci akan meningkat.

Koefisien Determinan

Berdasarkan output SPSS tampak bahwa perhitungan diperoleh Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.726. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar presentase variasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang bisa dijelaskan oleh variasi variabel bebas yaitu Pemahaman dan Peran Perangkat Desa adalah sebesar 72,6 % sedangkan sisanya sebesar 27,4 % dapat dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel penelitian.

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci secara Parsial (Sendiri-sendiri) maka dapat dijelaskan pada tabel 4.18. di bawah ini :

Berdasarkan tabel 4.18. terdapat *R Square* (Determinasi) adalah 0.412 *R Square* dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti besar pengaruh Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah 41,2 %, sedangkan sisanya 58.8 % dapat dijelaskan oleh sebab lain diluar variabel penelitian.

Berdasarkan tabel 3.19 terdapat *R Square* (Determinasi) adalah 0.308. *R Square* dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. sebesar 30.8 %, sedangkan sisanya 69.2 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

Uji Hipotesis F

Berdasarkan tabel 4.20. diatas diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 8.159 dengan tingkat signifikasi sebesar 0.855 sedangkan F_{tabel} ($\alpha = 0,05$; db regresi = $n-k-1 = 16-2-1=13$) adalah sebesar 3.81. Jadi $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ ($8.159 \geq 3.81$) Artinya bahwa secara bersama-sama (simultan) kedua variabel independen yang meliputi Pemahaman dan Peran Perangkat Desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Uji hipotesis t

Berdasarkan tabel 4.21 dari uji *Coefficients* atau uji t tes ternyata diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4.538 sedangkan t_{tabel} , dengan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ db = $n-2 = 16 - 2 = 14$ adalah 2.144 sehingga $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ yaitu $4.538 \geq 2.144$ dengan demikian maka berdasarkan kriteria uji signifikan dengan demikian maka berdasarkan kriteria uji signifikan, H_a diterima dan H_o ditolak artinya bahwa Pemahaman Perangkat Desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

Berdasarkan tabel 4.22 dari uji *Coefficients* atau uji t tes ternyata diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3.492 sedangkan t_{tabel} , dengan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ db = $n-2 = 16 - 2 = 14$ adalah 2.144 sehingga $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ yaitu $3.492 \geq 2.144$ dengan demikian maka berdasarkan kriteria uji signifikan dengan demikian maka berdasarkan kriteria uji signifikan, H_a diterima dan H_o ditolak artinya bahwa Peran Perangkat Desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

V. SIMPULAN

1. Terdapat Pengaruh antara Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci baik secara persial maupun simultan
2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa akan mengalami kenaikan jika ada pengaruh yang positif antara pemahaman dan peran perangkat desa
3. Besar pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci sebesar 72,6 % jika bersama-sama dan sendiri-sendiri pengaruh Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah 41,2 %, dan pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 30.8 % dan selebihnya dipengaruhi variabel lain di luar variabel penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2004. Metodologi Penelitian Bisnis, Bandung: Ciptapustaka Media
- Abu Ahmadi, 2005 Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta : Erlangga
- Benjamin, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bloom, 2001. Manajemen Kinerja, Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta
- Bruce J. Cohen, 2001. Psychology At Work. 5th Ed. Penguin Books. England.
- Lili, 2018. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi”. Jakarta. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Indrizal, 2006. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 10, No.2 : Hal. 273 – 288. Jombang.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Mahmudi, 2010. Perilaku Organisasi. PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- Mardiasmo, 2010. Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan”. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. I, Nomor 2. 822-834.
- Nana Sudjana, 2002. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan”. Jurnal Penelitian Universitas Riau.
- Nordiawan, 2010. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Jurnal Aset. Vol. 10, No.1.
- Nunnally, 2005. Perilaku Organisasi. Bandung: Pustaka Setia

- Riduwan, 2004. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta
- Sudaryono, 2006. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris”. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Soerjono, 2002. Peningkatan pemhaman UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar)”. Jurnal Penelitian Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
- Sujarweni, 2015. Analis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)”.Jurnal Penelitian Universitas Riau.
- Sulistiyan, 2011. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Skripsi. Universitas Halu Oleo. Kendari.
- Sugiono, 2003. Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Widjaja, 2003. Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru. Yogyakarta.